

**SKRIPSI**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
TAHUN 2014 DI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MOHAMMAD NUR ARIS SHOIM**

**11340144**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk keterlibatan rakyat di dalam pengembangan sebuah negara. Partisipasi politik pada dasarnya berasal dari kesadaran individu ataupun kelompok untuk turut terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan dan turut serta dalam pengembangan suatu negara. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi, sebagai negara yang menganut paham demokrasi Indonesia memerlukan partisipasi aktif dari seluruh warga negara tidak terkecuali masyarakat agar proses demokrasi dapat berjalan dengan maksimal. Partisipasi masyarakat dalam politik sangat dibutuhkan. Jumlah masyarakat yang begitu besar tidak diimbangi oleh partisipasi politik yang tinggi, sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan partisipasi politik tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor dominan peran kepala desa di kecamatan Kalasan kabupaten Sleman dalam mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan partisipasi politik pada pemilihan Presiden tahun 2014, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan juga hambatan-hambatannya.

Adapun metode yang di gunakan peneliti dalam mengungkap Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat pada tahun 2014 di Kecamatan Kalasan adalah menggunakan metode (*field research*) yaitu terjun langsung kelapangan yang menjadi obyek penelitian untuk memperoleh sumber data, seperti halnya dengan mengadakan wawancara kepada narasumber secara langsung dan juga pengamatan langsung peneliti baik dengan bahan yang sudah dipelajari oleh peneliti (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan adalah *kualitatif, deskriptif, normative*.

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Kalasan. Peranan kepala desa mempunyai imbas yang sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Kalasan untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Presiden pada tahun 2014, hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat kecamatan kalasan pada tahun 2014 menembus 80,87% dibandingkan pada tahun 2009 tingkat partisipasi politik masyarakatnya hanya 75,89% dan juga pada tahun 2004 hanya 72,44% . ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014 mempunyai dominasi tersendiri terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Partisipasi Politik, Pemilu Presiden.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Nur Aris Sho'im

NIM : 11340144

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Yang menyatakan,



*Mohammad Nur Aris Sho'im*  
**Mohammad Nur Aris Sho'im**  
NIM. 11340144

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Nur Aris Sho'im

NIM : 11340144

Judul : **"Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman."**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Maret 2016

**Pembimbing I**



**Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum**

**NIP. 19730825 1999031 004**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Nur Aris Sho'im  
NIM : 11340144

Judul : **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Maret 2016

**Pembimbing II**

**Faisal Luqman Hakim, S.H.M.Hum.**

**NIP.19790719 200801 1 012**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/72/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014 DI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD NUR ARIS SHO'IM  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340144  
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 28 Maret 2016  
\* UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

# MOTTO

**“Setiap Pemuda jika mempunyai keyaqinan dalam hatinya pasti keyaqinan tersebut akan terwujud”.**

*(Syarifuddin Yahya Al-Imrity)*

**“Gapailah cita-citamu walau banyak rintangan menghadang, hadapi dan pasti cita-citamu kan terwujud”.**

*(Muhammad bin abdillah bin Malik dalam Nadhom Alfiyah Ibnu Malik)*

**Yaqin Usaha Sampai**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orang Tuaku  
Karena berkat beliaulah naluri belajar dan berrfikir ini terus berjalan  
Untuk mewujudkan cita-cita beliau  
Yang senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama  
Keihlasan dan ketulusan beliaulah  
Yang menjadikan semangat ini terus mengalir  
Dengan selalu mengingatkan indahnyaberbagi untuk sesama manusia  
Dan selalu mengutamakan orang lain daripada pribadi beliau  
Dan selalu tertancap dalam dada ini tutur kata beliau  
Raihlah dunia dengan ilmu, raihlah akhirat dengan ilmu  
Dan jika ingin keduanya juga dengan ilmu  
Karena ilmu adalah cahaya dan tidak akan diturunkan oleh Allh  
Pada orang-orang yang berbuat maksiat



## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و

صحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

اما بعد.

Puja dan Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya di dunia, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.”** Untuk memperoleh gelar S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs Akh. Minhaji., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, MAg. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III besertastaf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum
6. Dosen Pembimbing II Bapak Bapak Faisal Luqman, S.H., M.Hum
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah berkenan membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmunya dengan Ikhlas.
8. Kepada segenap pengasuh Pondok Pesanteran Abu Dzarrin Kendal Dander Bojonegoro, terutama kepada Al-Muryid K. Abdul Kholiq A.M. yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbinganya.
9. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
10. Kepada kawan seperjuangan di HMI Komisariat Syariah dan Hukum, Cabang Yogyakarta, dan juga teman-teman Bidang Hukum dan

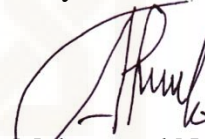
Ham PB HMI periode 2016-2018 yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi untuk berkarya lebih baik dari saat ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademisi. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 21 Maret 2016

Penyusun,



Mohammad Nur Aris Shoim  
NIM: 11340144

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuandanKegunaanPenelitian .....	5
D. TelaahPustaka .....	6
E. KerangkaTeoretik .....	10
F. MetodePenelitian .....	21
G. SitematikaPembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEPALA DESA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH</b>	
A. PengertianDesa.....	25
B. PengertianPemerintahanDesa.....	29
C. Pembangunan PemerintahanDesa.....	37
D. PenyelenggaraanPemerintahDesa .....	42
E. PemerintahanDesa yang baik .....	50
F. PembentukanPeraturanDesa.....	54
<b>BAB III TINJAUAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KALASAN</b>	
A. LetakGeografis.....	63
B. JumlahPenduduk .....	64

C. Gambaran Pemerintahan Kecamatan Kalasan .....	70
<b>BAB IV ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILHAN UMUM PRESIDEN</b>	
A. Peran Kepala Desa .....	80
B. Partisipasi Politik Masyarakat Kalasan .....	85
C. Hambatan-Hambatan .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## Daftar Tabel

### 1. Tabel I Persentase jumlah DPT Kecamatan Kalasan per Desa



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang (*Developing Country*) berusaha mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. Di negara berkembang upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara<sup>1</sup>.

Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi politik warga negara maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit untuk diwujudkan. Seiring dengan era reformasi yang semakin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk

---

<sup>1</sup>Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004. Hal. 144.

menikmatinya<sup>2</sup>.

Anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau partisipasi didalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama dibidang politik. Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun<sup>3</sup>. Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada perbedaan atas hak dan kewajibannya, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan warga negara didalamnya. Adapun miniatur dari pemerintahan negara adalah pemerintahan desa, dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga pemerintah mempunyai perhatian khusus terhadap pemerintahan desa terbukti atas disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan mempunyai paradigma baru bahwa perubahan baik ekonomi, pembangunan, dan kebijakan politik bukan hanya dari kota saja, akan tetapi membangun Indonesia harus mulai dari Desa.

---

<sup>2</sup>Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1998. Hal. 59.

<sup>3</sup>Devisi Kampanye Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, *Asa Itu Masih Ada Orang Muda Dalam Antologi Esai Keberagaman*, Jakarta : ANBTI, 2010. Hal. 125.



Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran-serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk program pemerintah desa kurang berkembang bahkan ada yang sudah tidak berlanjut. Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan sebagai motivator dari program tersebut kurang memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-menerus.

Peran kepala desa sangatlah penting diperlukan dengan keadaan masyarakat pedesaan yang berpendidikan masih cukup rendah dan kebanyakan adalah petani dan buruh itulah yang digambarkan pada Kecamatan Kalasan yang notabene memiliki sebuah varian yang berbeda dengan kecamatan lainnya di Yogyakarta, dengan masyarakat yang semi pedesaan dan kota menjadi gambaran kemajemukan dan realitas sosial dengan struktur sosial yang berbeda juga, walau begitu kecamatan kalasan adalah kecamatan terbaik dalam bidang administrasi di kabupaten Sleman Yogyakarta dan juga termasuk kecamatan yang menunjukkan prestasinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terus meningkat terhitung 72,44% masyarakat Kalasan dalam menyumbangkan suaranya pada pemilihan

Presiden di tahun 2004 dan meningkat 75,89% ditahun 2009<sup>4</sup>, sehingga peran kepala desa sangat diperlukan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi pada pemilihan umum Presiden pada tahun 2014, sehingga peneliti mengambil judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilhan Presiden 2014 diKecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang di ambil adalah :

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilhan Umum Presiden tahun 2014 diKecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?
2. Apa hambatan Kepala Desa dalam meningtkkan partisipasi politik masyakayat pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?

---

<sup>4</sup> Data Diperoleh dari Pusat data KPU Sleman dan juga diperoleh dari Litbang KPU DIY, atau bisa di akses di [WWW.KPUDIY.GO.ID](http://WWW.KPUDIY.GO.ID)

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian:**

1. Untuk Mengetahui sejauh mana Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Presiden tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

### **2. Manfaat Penelitian:**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat Kalasan.
- b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca

mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan;

b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu ini pada dasarnya adalah sebuah studi tentang bagaimana tindakan dan interaksi sosial kepala desa kepada masyarakat. Apa yang dilakukan kepala desa dalam rangka meningkatkan perolehan suara dalam menjalankan partisipasi masyarakat, tentu tidak akan keluar dari sistem dan strategi yang dipakai. Menghadapi dan mendukung taktik dan strategi kepala desa, serta mempertahankan dan meningkatkan perolehan partisipasi masyarakat, maka diperlukan kerangka<sup>5</sup> teoritis yang mampu memberi alasan-alasan ilmiah. Memang sudah banyak penelitian tentang peran kepala desa, tetapi penelitian ini beda dari penelitian-penelitian sebelumnya bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden tahun 2014 di kecamatan Kalasan yang belum pernah diteliti oleh orang lain.

Tesis dengan judul “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”, karya dari Suwadi Magister Hukum Pascasarjana Universitas

---

<sup>5</sup> Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press 2009). Hal. 4.

Muria Kudus, secara umum dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara umum pemerintah desa di wilayah Kecamatan Winong Kabupaten Pati telah memahami tugas-tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; (2) Secara umum Pemerintah Desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati telah melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; dan (3) Faktor-faktor yang mendorong kinerja Pemerintah Desa, diantaranya adanya dorongan kerja aparat di tingkat atasnya, meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa, adanya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Camat dan dampak pengangkatan Sekretaris Desa Sebagai PNS. Sedangkan faktor penghambat pemerintah desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diantaranya adalah menyangkut hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemampuan pelaksanaan tugas Aparat Pemerintah Desa, dan ketidakjelasan kewenangan Desa sesuai perundang-undangan yang ada.<sup>6</sup>

Kemudian guna mewujudkan pemerintahan desa yang bersinambungan dengan program pemerintahan daerah dan pusat. Perlu kita kaji bersama-sama Skripsi karangan Fitri Ariyani, dengan judul Studi tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Wonorejo kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar, Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun

---

<sup>6</sup> Suwadi, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kecamatan Winong Kabupaten Pati*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muria, Kudus, 2012.

2006 juga mengungkap seberapa besar peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga dengan tingkat kesadaran masyarakat desa berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan desa belum optimal. Hal ini terkait dengan ketepatan masyarakat dalam membayar iuran swadaya dan gotong-royong. Dalam konteks membangaun demokratisasi yang ada dalam masyarakat desa disinilah peran kepala desa seharusnya mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur sesuai dengan tujuan negara dan tujuan agama semestinya. Agar jalannya peran kepala desa dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat secara optimal, diperlukan keselarasan dan keseimbangan hubungan antar kekuatan sosial politik dan keseimbangan serta keselarasan peran partai politik itu sendiri baik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, maupun sebagai sarana pengaturkonflik<sup>7</sup>.

Skripsi dengan judul “*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo*” Oleh Atiek Lestari adapun hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Purworejo tergolong masih rendah, karena hasil survey menunjukkan 61,2% responden kurang berpartisipasi aktif dalam Pilgub Jateng 2008.

---

<sup>7</sup> Fitri Ariyani, *Studi Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Desa Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.

Hal ini diperkuat hasil wawancara mendalam yang sebagian besar kurang berpartisipasi aktif dalam politik terutama dalam Pilgub Jateng 2008. Dari beberapa bentuk partisipasi politik secara konvensional, mendiskusikan diantaranya perihal seputar pilgub, seperti mengikuti kampanye dari pasangan calon dalam pilgub, menyumbang dana untuk kampanye calon dalam pilgub, menjadi tim sukses salah satu calon dalam pilgub, menjadi panitia pilgub, serta memberikan suara bagi salah satu pasangan calon dalam pilgub; bentuk partisipasi yang paling lazim dan paling umum dilakukan masyarakat Kabupaten Purworejo adalah memberikan suara kepada salah satu pasangan calon dalam Pilgub Jateng 2008. Hal tersebut seperti terlihat pada hasil survey yang menunjukkan 73,6% responden memberikan suara dalam Pilgub Jateng 2008.

Sedangkan bentuk partisipasi yang paling jarang dilakukan adalah mengikuti kampanye dan menyumbang dana untuk kampanye bagi Cagub dan Cawagub dalam Pilgub Jateng 2008 yang masing-masing hanya sebesar 0,8%. Dalam skripsi di atas juga disebutkan bahwa pemilih di Kabupaten Purworejo sebagian besar tergolong pemilih yang rasional karena mendasarkan pilihannya kepada pasangan Cagub dan Cawagub atas pertimbangan tertentu. Dari 73,6% responden yang memberikan suara, 51,2% diantaranya mendasarkan pilihannya atas penilaian/pertimbangan tertentu. Penilaian/pertimbangan tersebut meliputi antara lain penampilan (performance), program kerja (platform), dan latar belakang pribadi. Penilaian yang paling banyak menjadi pertimbangan bagi

pemilih adalah karakter pribadi<sup>8</sup>.

Tesis hasil penelitian lapangan dengan judul “*Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008*”, yang disusun oleh Marlina Tarigan mampu menjadikan peneliti sebagai referensi untuk menggali bagaimana memulai penelitian kedepannya. Penelitian yang menyoroti masalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pelaksanaan Pilkada langsung, Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Kecenderungan yang ada pada saat ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik dalam pilkada. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Temanggung dalam pilkada. Adapun hasil dari penelitian skripsi di atas adalah menunjukkan bahwa partisipasi tertinggi pada responden yang berpendidikan rendah, sedangkan partisipasi paling rendah pada responden yang berpendidikan menengah, sedangkan responden yang berpendidikan tinggi partisipasinya dibawah yang berpendidikan rendah<sup>9</sup>.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Peran**

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup> Fitri Ariyani, *Studi Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Desa Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.



Istilah peran banyak juga orang mengungkapkan dengan kedudukan atau posisi ada juga yang mengungkapkan tentang fungsi awalnya merupakan terjemahan dari katafunction<sup>10</sup>. Suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Adapun penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain<sup>11</sup>, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan.

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturisasi<sup>12</sup> dan paham interaksionis<sup>13</sup>. Paham strukturisasi lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit cultural, serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah dicanangkan oleh system budaya. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis,

---

<sup>10</sup> Adapun makna dari kata “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Dapat juga dijelaskan lewat beberapa cara, salah satu dari berbagai cara tersebut adalah dalam pendekatan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. George Towar Iqbal Tawakkal, *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009*, Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Strukturisasi ini mencakup isu-isu berhubungan dengan watak tindakan manusia dan sebagai pelaku, bagaimana interaksi hubungannya dengan institusi-institusi serta upaya memahami konotasi-konotasi yang terjadi dalam praktek sosial.

<sup>13</sup> Interaksionis merupakan sebuah tindakan atau interaksi manusia terhadap manusia lain agar terjadinya hubungan sosial., Stephen Palmquist, *Pohon Filsafat Teks Kuliah Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), Terjemahan Bahasa Indonesia dengan judul Asli, *The Tree Of Philosophy A Course Of Introductory Lectures For Beginning Student Of Philosophy*, (Hongkong : Phylpsychy Press, 2000).

baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya.

Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran; terutama setelah peran tersebut merupakan suatu : perwujudan peran, yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari system sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur social yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu Nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seorang dengan yang lainnya, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Peran yakni serangkaian pola perilaku yang diharapkan diberbagai lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok sosial. Peran yang ditetapkan adalah peran yang dijalani dan seseorang tidak mempunyai pilihan. Peran yang diambil adalah yang terpilih atau dipilih oleh individu. Peran adalah sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peran yang ditetapkan adalah peran dimana seseorang tidak punya pilihan, sedangkan peran yang diterima

adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. Posisi dibutuhkan oleh individu sebagai aktualisasi diri.

Jika seseorang individu memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Maka akan banyak permasalahan didalamnya semisal lupa akan peran utamanya. Karena peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri seorang untuk menunjukkan eksistensi pada dirinya terhadap diri orang lain. Peran yang memenuhi kebutuhan dan sesuai ideal diri, menghasilkan harga diri yang tinggi atau sebaliknya. Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor<sup>14</sup> terhadap peran. Stress peran timbul karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakannya. Stress peran terdiri dari, konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai dan peran yang terlalu banyak<sup>15</sup>.

## 2. Demokrasi

Pemerintah demokrasi telah berkembang dari Yunani Kuno, dengan perdebatan-perdebatan saat itu oleh kalangan tokoh-tokoh filsuf diantaranya<sup>16</sup>: Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Polybius dan Cicero. Socrates memiliki gagasan tentang bentuk pemerintahan (negara) yang dicita-

---

<sup>14</sup>Stress peran terdiri dari konflik peran yang tidak jelas dan peran yang tidak sesuai atau peran yang terlalu banyak. Peran yang tidak jelas, terjadi apabila individu diberikan peran yang kabur, sesuai perilaku yang diharapkan. Misalnya : individu yang ditetapkan sebagai ketua panitia, tetapi tidak disertai uraian tugas apa yang ia harus lakukan atau kerjakan. *Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Raitsul Muttaqin, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nusa Indah, 2010), Hal. 16, Terjemahan dari buku, Carl Joachim Fredrich, *The Philosophy Of Law In Historical Perspektif* (The University Of Chicago Press, 1969).

citakannya<sup>17</sup>, yaitu negara demokrasi, yang menyatakan bahwa negara yang yang dicita-citakannya tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat (umum).

Perkembangan pemerintahan demokrasi dalam suatu negara lebih lanjut mempengaruhi pemikiran Plato<sup>18</sup>. Menurut pendapat filsuf Plato dan Aristoteles, mengelompokkan pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan yang yang dicita-citakan dan pemerintahan yang korup<sup>19</sup>. Perbedaan yang lain terletak pada penggunaan kriteria masing-masing dengan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pemerintahan demokrasi menurut Plato menganut pada indikator pemerintahan kualitatif yaitu pada kualitas pendidikan dan moral pemimpin, sedangkan oleh Aristoteles berdasarkan pada jumlah orang yang memimpin dan untuk kepentingan beberapa orang. Bahwa sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Mansour Fakhri, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998. Hal. 17.

<sup>20</sup> Sistem demokrasi menurut pandangan Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo bahwa, demokrasi sebagai sistem politik, tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral dan beberapa nilai (values), yang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan sejarah serta

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga sehingga dalam setiap perselisihan yang terjadi diupayakan dilakukan secara kompromi<sup>21</sup>, konsensus atau mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat dicarikan jalan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar untuk memaksakan sehingga tercapai kompromi atau mufakat.

Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam sistem sosial di masyarakat terjadi perubahan-perubahan sosial, sehingga pemerintah harus menyesuaikan kebijaksananya sesuai dengan perubahan-perubahan untuk mencegah adanya sistem diktatur. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, Penyelenggaraan pergantian pimpinan melalui demokrasi, tidak dengan keturunan seperti halnya pemerintahan pada kerajaan.

Dengan mengikutsertakan golongan-golongan minoritas dalam diskusi-diskusi secara terbuka dan kreatif, sehingga merasa turut bertanggungjawab. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman yang ada pada sebuah Negara, seperti halnya Negara Indonesia dengan berbagai suku bangsa dan juga bahasa yang berbeda disetiap suku yang ada didalamnya. Dalam masyarakat pasti adanya keanekaragaman berpendapat, bertingkah laku, sehingga diperlukan terselenggaranya masyarakat yang terbuka serta kebebasan dalam berpolitik.

---

budaya politik masing-masing. Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, 1981, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, PT Gramdia, Jakarta.

<sup>21</sup>Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, 1981, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, PT Gramdia, Jakarta, hal. 61.

Demokrasi disebut sebagai gaya hidup, sehingga keanekaragaman perlu dijaga untuk menciptakan persatuan<sup>22</sup>.

Menjamin tegaknya keadilan dalam demokrasi tentu adanya golongan-golongan terbesar mewakili dalam lembaga perwakilan, tentu golongan lain merasa diperlakukan tidak adil. Dengan demikian diperlukan keadilan yang relatif lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang. Demokrasi dalam kerangka pemerintahan daerah dan desentralisasi dari sejak dulu oleh para pendiri negara Indonesia antara lain Mohammad Hatta dan Soepomo, meletakkan dasar kedaulatan rakyat sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Moh. Hatta disebutkan bahwa dasar kedaulatan rakyat, yakni hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa dan didaerah.

Menurut pendapat Soepomo yang tidak berbeda dengan Moh Hatta<sup>23</sup>, bahwa Soepomo menuntut agar politik pembangunan Negara Indonesia disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia<sup>24</sup>. Bentuk Negara Indonesia harus diungkapkan ”semangat kebatinan bangsa Indonesia”, yaitu hasrat rakyat akan persatuan, maka ia secara konsekwen mendukung desentralisasi<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Sudarsono Seodono, *Obrolan Nusantara*, Jakarta : Firdaus, 2012. Hal. 34.

<sup>23</sup> Mohammad Hatta, 1976, *Kearah Indonesia Merdeka* (1932), dalam Kumpulan Karangan Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 103.

<sup>24</sup> Robert A. Dahl dikutip HS. Tisnanta, 2005, *Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* dalam Muladi : Editor, HAM, *Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hal. 76.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Dalam prinsip-prinsip demokrasi yang terbentuk dari asas desentralisasi mengarahkan kepentingan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri dalam mengurus pada hak dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokrasi<sup>26</sup>. Pemerintahan daerah yang demokrasi terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat didalam menentukan pemimpin di daerah serta mengawasi jalannya kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemerintahan demokrasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: daerah, luas dan warga negara yang banyak jumlahnya, urusan yang begitu kompleks dan berbelit-belit, oleh karena itu pemerintahan demokrasi sekarang ini, yang benar-benar ikut aktif dalam pemerintahan bukanlah rakyat atau warga negara itu sendiri, melainkan adalah wakil-wakil rakyat, yang terkumpul dalam suatu kesatuan, yang disebut dewan perwakilan rakyat. Dengan catatan bahwa wakil-wakil rakyat itu didalam ikut serta aktif di dalam memikirkan jalannya pemerintahan, harus benar-benar membawa suara rakyat, kehendak rakyat, harus mencerminkan kemauan rakyat, jadi pokoknya badan perwakilan rakyat itu harus bersifat representative. Oleh karena itulah kita menyebutnya dengan pemerintah perwakilan rakyat yang representatif.

Berdasarkan uraian diatas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka

---

<sup>26</sup>Franz Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 13 – 14

pemerintahan daerah adanya dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan kedaulatan rakyat . Sehingga teori demokrasi berhubungan dalam desentralisasi dan otonomi daerah harus diimplimentasikan pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang berasaskan otonomi dandentralisasi<sup>27</sup>, maka kepala daerah sebagai pemimpin daerah yang dipilih secara berpasangan dengan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis , dimana kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah merupakan hasil dari suatu proses pemilihan langsung dari rakyat dalam pemilihan umum kepala daerah dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga dihasilkan kepala daerah yang demokratis, dan mampu bertanggungjawab terhadap rakyat pemilih dalam suatu daerah, serta sebagai unsur pemerintahan daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah, diharapkan mampu melaksanakan pemerintahan di daerah yang demokratis, dengan mengikutsertakan partisipasi warga masyarakat, mampu menyerap aspirasi masyarakat, dan menerima masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat didaerah serta memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat daerah.

Hubungan antara desentralisasi dan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sendi-sendi yang menumbuhkembangkan aspirasi masyarakat, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta memberikan

---

<sup>27</sup>Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta :Liberty, 1996, Hal. 242.



ruang gerak pemerintahan daerah sendiri dalam perumusan kebijaksanaan daerah, penyusunan program-program pemerintahan daerah yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta terselenggaranya organisasi pemerintahan daerah yang terpelihara dan dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintahan daerah.

### **3. Teori Partisipasi Politik**

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas system politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan<sup>28</sup>.

Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas, mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang telah mengenai partisipasi politik<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Rush Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Press, 2003, hal. 122

<sup>29</sup> Sementara menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan

Pengertian yang luas mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan<sup>30</sup>, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.

Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi<sup>31</sup>. Disebabkan oleh sejumlah alasan berikut: pertama, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip daripada di alam realitas. Kedua, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya. Ketiga, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor *internalisasi* pada akhirnya akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi

---

keputusan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Samuel Huntington, Joan Nelson, *Partisipasi politik di Negara berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Hal. 17.

<sup>30</sup> Coen Husain Pontoh, *Gerakan Massa Menghadang Imperealisme Global*, Yogyakarta: Resist Book, 2005. Hal.13.

<sup>31</sup>Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua actor, individu dan individu lainnya dalam hal ini adalah dari kepala daerah ke masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan Umum Presiden secara langsung. Mobilisasi terkadang dianggap sebagai sebuah kondisi awal dari evolusi menuju Partisipasi Politik. Partisipasi Politik dianggap sebagai kondisi ideal sebuah iklim demokrasi yang baik. Namun, pada praktiknya, hal tersebut tidak selamanya berjalan seperti itu. Mobilisasi Politik bukan sekedar sebagai proses dimana warga Negara diarahkan pada keterlibatan politik. *Ibid.*

dimobilisasi<sup>32</sup>. Dari beberapa bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal dan cara yang prinsipil dalam upaya mencapai satu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian tersebut. Dalam melakukan penelitian tentang Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden tahun 2014 di Kecamatan Kalasan. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian “*Field Research*” yaitu penelitian dengan terjun secara langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian atau penelitian lapangan dimana dalam memperoleh data-data penyusun melakukan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang atau lembaga yang menjadi obyek penelitian atau yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dibantu dengan bahan hasil-hasil penelitian yang menunjang peneliti untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap penelitian.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

### **a) Bahan Hukum Primer**

Yaitu teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung ke narasumber yang diajukan kepada pejabat pemerintah Desa dan tokoh masyarakat seperti: Bapak Camat, kepala desa,, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden diKecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 2014.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas: UUD 1945, UU tentang Desa, UU tentang Pemilu, Buku-buku tentang Otonomi Desa, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, Partisipasi Politik, dan juga Hukum pemilihan Presiden 2014.

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Sumber-sumber lain atau data tertentu yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang tertulis dalam media masa yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti: Koran, Majalah, Website, dan yang lainnya.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah “*Diskriptik Analitik*”, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk

menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah berlaku. Fakta yang akan menjadi obyek di sini adalah peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik, guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan<sup>33</sup>.

### **3. Analisis data**

Setelah terkumpul data-data yang diperlukan maka langkah selanjutnya data yang bersifat kualitatif ini<sup>34</sup> akan dianalisis dengan menggunakan deduktif dan interpretatif<sup>35</sup>. Cara berpikir deduktif dan interpretasi ini, digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi baru mengenai peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 2014.

---

<sup>33</sup> Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press, 2009).

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

<sup>35</sup> Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif, Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 42-43.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sementara sebagai berikut<sup>36</sup>:

Bab Satu adalah Pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua adalah Tinjauan umum Kepala Desa sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan Pemilihan Presiden 2014 dikecamatan Kalasan dan juga bagaimana mengukur partisipasi masyarakat dalam mensukseskannya..

Bab Tiga adalah Tinjauan Pemerintahan Desa diKecamatan Kalasan Kabupaten Sleman meliputi letak geografis, struktur pemerintahan desa

Bab Empat adalah Analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden diKecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 2014.

Bab Lima adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat sangat penting, karena partisipasi politik merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah Pemilihan Presiden secara umumnya dan di Kecamatan Kalasan. Dalam hal ini dapat dilihat adanya pengaruh dan Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Kalasan. Ada tiga faktor peran Kepala desa yaitu: membimbing masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Sehingga tahun 2014 partisipasi politik masyarakat mampu mencapai angka 82,25% meningkat dibandingkan pada tahun 2009 hanya 75,89% dan juga pada tahun 2004 hanya 72,44%. Pada intinya masyarakat akan menentukan untuk berpartisipasi ketika partisipasi tersebut memberikan keuntungan secara nyata kepada dirinya.
2. Dengan demikian untuk mendapatkan partisipasi politik masyarakat yang tinggi perlu diperhatikan bagaimana faktor kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat akan sadarnya menggunakan hak pilihnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi politik. maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan baik bagi para pembaca, pemerintah, maupun para praktisi politik yaitu:

1. Masyarakat harus terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya partisipasi dalam politik. Partisipasi politik dalam Pemilu Presiden akan menentukan pemimpin yang akan turut menentukan nasib masyarakat selama lima tahun kedepan.
2. Kepala Desa dan jajarannya harus lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
3. Para calon Presiden seharusnya melakukan kampanye dengan cara-cara yang lebih inovatif dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat agar antusias masyarakat tumbuh tanpa ada keraguan.
4. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat agar terjamin kesejahteraan bagi masyarakat.



**Daftar Pustaka :**

- Amirudin, dan Bisri A. Zaini., *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Awang, Azam, *Imlementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kecamatan Kalasan Dalam Angka 2014*,
- Beetham, David, *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta, Kanisius, 2006, Terjemahan dari *Introducing Demokrasi: 80 Question and Answer*, Oleh Bern Hidayat.
- Bintaro, R., *Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Budairi, Muhammad, *Masyarakat Sipil Dan Demokrasi Dialektika Negara dan LSM Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum*, E- Law Indonesia, 2002.
- Budiarjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Devisi Kampanye Aliansi Nasioanal Bhineka Tunggal Ika, *Asa Itu Masih Ada Orang Muda Dalam Antologi Esai Keberagaman*, Jakarta : ANBTI, 2010.
- Dwipayana Ari AAGN, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta, IRE Pres Yogyakarta, 2003.
- Eriyanto., *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Firmansyah., *Marketing Politik : antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Fakih, Mansour, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- George Towar Ikkal Tawakkal, *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009*, Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Hatta, Mohammad, *Kearah Indonesia Merdeka (1932)*, dalam Kumpulan Karangan Jilid I, Bulan Bintang , Jakarta, 1976.

- HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Husain Pontoh, Coen, *Gerakan Massa Menghadang Imperealisme Global*, Yogyakarta : Resist Book, 2005.
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Huda, Nikmatul, *Otonomi Daerah Filosofi, sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Irawan Tahir. Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, CV Fokus Media. 2007.
- Juliantara, Dadang, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Lestari, Atiek, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- Locke, John, *Kuasa Itu Milik Rakyat*, Kanisius, Yogyakarta 2006, Terjemahan dari , *An Essay Conserving, Ex-ten and End Of Civil Government, Dalam Two Treties Civil Goverment*, Oleh A. Widyamartaya.
- Muttaqin, Raitsul, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nusa Indah, 2010), Hal. 16, Terjemahan dari buku, Carl Joachim Fredrich, *The Philosophy Of Law In Historical P erspektif* (The University Of Chicago Press, 1969).
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2011.
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta, PT Bumi Aksara. 1991
- Palmquist, Stephen, *Pohon Filsafat Teks Kuliah Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), Terjemahan Bahasa Indonesia dengan judul Asli, *The Tree Of Philosophy A Course Of Introdutory Lectures For Beginning Student Of Philosophy*, Hongkong: Phylopsychy Press, 2000.

- Penulis, Tim, Syariah UIN Sunan Kalijaga, *Tekhnik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Fakultas Syariah Press, 2009.
- Penulis, Tim, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat bangsa, 2003
- Penulis, Tim, *HMI Untuk Rakyat, Membangun Desa, Membangun Bangsa*, Jakarta: PB HMI Publishing. 2014.
- Penulis, Tim, *Pemerintahan Desa yang baik*. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progress, 2013.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip., *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Serata Press, 2014
- Seodono, Sudarsono, *Obrolan Nusantara*, Jakarta : Firdaus, 2012.
- Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2005.
- Suseno, Franz Magnis, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Tarigan, Marlina *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008*, Progras Studi Magister Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah

Wahidin, Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

[www.slemankab.bps.go.id](http://www.slemankab.bps.go.id)

[www.kpudiy.go.id](http://www.kpudiy.go.id)





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 863800  
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 47 / 2015

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman  
Nomor : 070/Kesbang/47/2015  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 08 Januari 2015

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : M, NUR ARIS SHOIM  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11340144  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Padang Trucuk Bojonegoro Jatim  
No. Telp / HP : 089671562007  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN**  
Lokasi : Desa se-Kecamatan Kalasan, Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 08 Januari 2015 s/d 08 April 2015

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 8 Januari 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris



u.b.  
Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Rembina IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. KPU Kab. Sleman
3. Camat Kalasan
4. Kepala Desa Purwomartani, Kalasan
5. Kepala Desa Tirtomartani, Kalasan
6. Kepala Desa Tamanmartani, Kalasan
7. Kepala Desa Selomartani, Kalasan
8. Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN Suka Yk.
9. Yang Bersangkutan

## DAFTAR PERTANYAAN

**Nama** : Syamsul Bahri, S.I.P.  
**Jabatan** : Camat Kalasan  
**Tanggal** :20- Januari- 2015

1. Apakah sebelum diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada desa sudah mengadakan sosialisasi?

Jawaban: Melihat dari pantauan saya setiap kepala desa dari kecamatan kalasan sudah melakukan pertemuan terkait sosialisasi tersebut.

2. Kira-kira berapa kali pak setiap desa melakukan sosialisasi tersebut?

Jawab: Kalo terkait berapa kalinya saya kurang begitu ingat karena tiap desa berbeda-beda itu bisa langsung ditanyakan kepada kepala desa atau perangkat desa yang bersangkutan.

3. Apakah ada cara lain pak selain sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik setiap desa.

Jawab: mungkin lebih bersifat mengajak dan menghimbau agar turut serta dalam mensukseskan pemilihan presiden, karena peran kepala desa ini sangat penting disamping dia sebagai contoh juga sebagai penggerak massa. Karena partisipasi ini ada beberapa klasifikasinya. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Kalo ditanya cara lain yach

semua tergantung posisi kepala desa masing-masing. Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu melalui penguatan terhadap peran kepala desa tersebut. Dengan alasan bahwa kepala desa diwajibkan melakukan pendidikan politik. Jangan sampai ada partai politik yang mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus menerus, bisa dipastikan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang. Bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu. Yach ini tugas dari kepala desa dan juga perangkatnya. Kalo camat kan hanya memantau saja, hehehe

4. Menurut bapak Bagaimana cara untuk menggerakkan atau mengkoordinir masyarakat agar sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik?

Jawaban: Kesempatan berpartisipasi berasal dari dalam dan luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Yach pastinya dengan adanya dukungan dari kepala desa dan

pemerintah setempat untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa memilih presiden itu hukumnya wajib.

5. Apakah bapak ikut mengkoordinir masyarakat untuk memilih?

Jawaban: Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik, hal ini sering saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan pertemuan bersama kepala desa dan juga pejabat kecamatan dan juga pemerintahan desa.

6. Tindakan apa saja yang menjadi contoh teladan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawaban: ya himbaun tadi dan ajakan, pastinya datang ke TPS untuk mencoblos.

7. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

aktif dalam pemilihan presiden?

Jawaban: dalam hal ini menurut pengamatan saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam politik, *Pertama*



*faktor administrasi;* Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

*Kedua faktor sosialisasi;* Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder baik Ormas, LSM, OKP tentunya pemerintahan desa serta masyarakat untuk terus selalu menyebarluaskan informasi tersebut secara massif.

*Ketiga faktor politik;* faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan

partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.

8. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden?

Jawaban: Dalam hal ini bisa kita lihat dua penyebab kenapa masyarakat datang dan tidak dalam pencoblosan. *Pertama faktor teknis*; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. *Kedua faktor pekerjaan*; maksudnya adalah pekerjaan sehari – hari. Seperti misalkan warga Kecamatan kalasan sudah menjadi mafhum bersama jika banyak penduduknya yang mencari nafkah, karena sebagian besar faktor pekerjaan ini dilihat dari sektor pekerjaan informal seperti pertanian, sektor perdagangan, Industri, serta jasa kemasyarakatan.

9. Menurut Bapak apasaja yang menjadikan pemilihan presiden pada 2014 ini kecamatan kalasan termasuk mampu meningkatkan pemilihnya?

Jawab: Menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan. *Pertama*, hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini. Hal ini pemerintah desalah yang paling mempunyai peran karena meraka berdekatan langsung dengan masyarakat.

*Kedua*, pendidikan bagi masyarakat perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan masyarakat. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

*Ketiga*, perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa

dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

*Keempat*, tentu saja terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.

*Kelima*, lembaga penyelenggara pemilu bekerjasama yang berkesinambungan dengan lembaga pendidikan, Ormas, LSM lebih-lebih kepada pemerintahan desa untuk terus mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada semua level masyarakat. Karena selama ini kerjasama tersebut bersifat momentum menjelang pemilihan sehingga kerjasama tersebut hanya bersifat sosialisasi yang tidak menyentuh keakar rumput.

10. selanjutnya apa saja visi dan misi kecamatan kalasan ini pak?

Jawab: oh hal itu bisa minta datanya kepada kepala urusan pemerintahan kecamatan, tapi secara singkatnya adalah: *“Terwujudnya kecamatan sebagai pendukung utama penyelenggaraan pemerintahan daerah”*.. Visi Kecamatan Kalasan tersebut mengandung makna filosofis bahwa ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berada di

tingkat kecamatan. Posisi ini, mengindikasikan bahwa kecamatan memiliki peran yang sangat strategis, sehingga apapun yang menjadi performance kecamatan merupakan performance Kabupaten.

Untuk itu penting dipedomani bahwa tata kelola pemerintahan dan pelayanan kecamatan yang baik akan menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan berwibawa yang mampu membawa masyarakat untuk lebih sejahtera. Pada sisi lain tata pemerintahan dan pelayanan kecamatan yang baik akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya trust, tegaknya supremasi hukum, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, efektif dan efisien.

Untuk menciptakan tata pemerintahan kecamatan yang baik memerlukan sinergitas antar pilar pemerintahan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bersama membangun masyarakat menuju lebih baik dan sejahtera. Kerjasama antar ketiga pilar tersebut merupakan bentuk kebersamaan yang dapat saling melengkapi untuk menghindari over dominasi dari masing-masing pilar. Menghadapi dinamika dan perkembangan disegala aspek saat ini, pemerintah tidak akan mampu sendirian menghadapinya sehingga harus ada pelibatan secara aktif dari sektor swasta dan masyarakat untuk berjalan seiring menciptakan tatanan yang lebih baik menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya harus dibangun sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dengan membuka informasi secara obyektif pada masyarakat sehingga akan mendorong tumbuhnya

partisipasi aktif masyarakat dari semua lapisan dengan mengedepankan kesetaraan gender, dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua pemangku kepentingan.

Masyarakat sejahtera merupakan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya, kecukupan kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya. Kecukupan kebutuhan dasar tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalasan baik lahir maupun batin. Kondisi masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat yang damai, tenteram, dan tercukupi kebutuhannya lahir dan batin.

Suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan merupakan kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten. Untuk itu mulai dari aspek anggaran, sumberdaya manusia, sarana prasarana, sistem dan prosedur serta hal-hal lain yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan harus disikapi sebagai hal yang penting dan strategis oleh semua pihak. Hal ini diperlukan perubahan mindset oleh pemegang kebijakan, eksekutor kebijakan, maupun pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan. Visi ini akan dijabarkan dalam beberapa misi sebagai penjabaran implementatif dari revisi visi yang telah ditetapkan. Visi dan misi selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kalasan mulai tahun 2014 – 2015.

Adapun Misi Kecamatan Kalasan berdasarkan perubahan visi juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

1. Memantapkan pengelolaan pembangunan daerah di Kecamatan.

## 2. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

Misi kesatu adalah “*Memantapkan pengelolaan pembangunan daerah di Kecamatan*”. Misi ini merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kalasan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran negara baik APBN/APBD. Pada sisi lain dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan manfaat serta akselerasi pembangunan di tingkat kecamatan. Lebih jauh dengan misi ini juga diharapkan akan meningkatkan peran dan sinergi sumberdaya manusia dan sumberdaya lain dari berbagai instansi/komponen masyarakat. Aspek implikatif yang diharapkan dari misi ini, adalah meningkatnya desentralisasi peran pada berbagai kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik selama berorientasi pada meningkatnya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta manfaat bagi masyarakat. Hal ini penting mengingat dalam banyak hal fungsi dan peran kecamatan sering diposisikan hanya pada fungsi fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan berbagai posisi lain yang tidak substantif.

Misi kedua “*Meningkatkan pelayanan masyarakat*”. Misi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kalasan untuk memberikan pelayanan terbaik/prima kepada masyarakat. Pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan yang diinginkan.

Pelayanan diberikan dengan mengedepankan pelayanan yang lebih cepat, lebih care, lebih murah, dan lebih transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lebih berorientasi pada customer satisfaction. Hal ini bagi masyarakat menjadi lebih dimudahkan dalam segala

urusan terutama yang berkaitan dengan pemerintah, yang selama ini sering diposisikan sebagai instansi yang memberi pelayanan lamban, kurang ramah, dan citra negatif yang lain. Pelayanan yang diorientasikan sesuai misi tersebut akan meningkatkan citra pemerintah, trust dan meningkatkan derajat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.





## **DAFTAR PERTANYAAN**

**Nama** : Nur widayati, SH.  
**Jabatan** : Kepala Desa Selomartani  
**Tanggal** :22- Januari- 2015

1. Apakah sebelum diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada desa sudah mengadakan sosialisasi?

Jawaban: sudah setiap ada pertemuan dengan dukuh dan warga kita selalu mensosialisasikan setiap ada pertemuan.

2. Bagaimana cara untuk menggerakkan atau mengkoordinir masyarakat agar sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik?

Jawaban: karena kita hidup dalam Negara hukum berdasarkan pancasila yang didalamnya ada bahwa kita harus menjadi masyarakat yang baik , untuk itu kita memanfaatkan hak kita untuk memilih pimpinan kita untuk menentukan seorang presiden. maka kita harus sadarkan masyarakat untuk memilih seorang presiden, Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan Negara.

3. Apakah ibu mengkoordinir masyarakat untuk memilih?

Jawaban: kita tidak mengkoordinir tetapi setiap ada pertemuan kita menganjurkan memohon dan meminta pada masyarakat untuk hadir di TPS-TPS agar memilih calon presiden yang sesuai dengan keinginan hati tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

3. Tindakan apa saja yang menjadi contoh teladan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawaban: datang ke TPS, mensosialisasikan calon tanpa memihak salah satu calon, kita sampaikan calonnya ada banyak, untuk tahun 2014 ini ada dua sosok yaitu Jokowi atau Prabowo. Dan apabila ada masyarakat yang bertanya terkait adanya pemilihan presiden dan lain-lain kami beserta perangkat desa selalu memberikan jawaban dan banyak masyarakat yang puas atas kinerja kami, terbukti dengan terpilihnya saya kedua kalinya menjabat sebagai kepala desa selomartani. Kami juga memberikan pengarahan kepada masyarakat kepala desa tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden, kami tidak sendiri tetapi perangkat desa semisal Dukuh, RT, dan RW juga memberikan pengarahan kepada masyarakat.

4. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden?

Jawaban: berpartisipasi dalam pemilihan karena satu suara bisa menentukan pimpinan kita lima tahun kedepan, karena pemilihan presiden hanya sekali dalam lima tahun, maka setiap penduduk harus punya peran untuk memilih presiden pilihannya masing-masing, tanpa ada paksaan dari pihak

manapun. Karena Indonesia Negara demokrasi maka kita harus memilih sebagai hak pilih kita masing-masing.

5. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden?

Jawaban: kendala didesa selomartani karena kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani, jadi merasa saying untuk meninggalkan pekerjaannya masing-masing. Kita selalu menyadarkan karena ini kan lima tahun sekali.

6. apakah warga ada yang ikut berkampanya mendukung salah satu calon presiden?

Jawaban: ada tetapi tidak banyak karena warga selomartani tidak sampai mendukung secara terang-terangan dalam memilih dan berkampanye,

7. apakah ada konflik dalam pemilihan presiden baik pada tahun 2014 atau tahun sebelumnya?

Jawaban: di desa selomartani tidak pernah ada konflik karena disini masyarakatnya tidak terlalu dalam berpolitik maka tidak ada sampek terjadi konflik karena kita punya pilihan untuk memilih.

8. Apakah di masyarakat selomartani ada cara-cara tertentu untuk mensosialisasikan calon presiden?

Jawaban: kalo masalah itu tidak ada bahkan kalo masyarakat terpelajar seperti dosen dia bisa tau calonnya lihat dari internet dan media lainnya, maka mereka semakin tau siapa jokowi-JK, siapa Prabowo-hatta, kalo petani bisa

dipengaruhi untuk mengajak memilih salah satu presiden tersebut.

9. caranya bagaimana buk?

Jawaban: kita tidak ada cara tertentu untuk mensosialisasikan, karena itu tugas KPU bukan Tugas desa karena kita sebagai perangkat desa hanya membantu KPU untuk mensukseskan pilhan presiden dan wakilnya pada tahun 2014 ini. Dan kita sering mengungkapkan pada saat-saat pertemuan, semisal pertemuan dengan dukuh setiap hari jum'at untuk menginformasikan terhadap warga dukuh masing-masing agar datang ke TPS saat pemilihan presiden guna memilih salah satu calon presiden yang sesuai dengan pilihan hati masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Begitu juga dengan kita sebagai perangkat desa juga menyampaikan kepada warga dan keluarga untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

**Nama** : **Bekti Susano, SSi.**  
**Jabatan** : **Sekretaris Desa Tirtomartani**  
**Tanggal** : **21- Januari- 2015**

1. Apakah sebelum diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada desa sudah mengadakan sosialisasi?

Jawaban: secara informal sudah menyampaikan dalam pertemuan-pertemuan baik tingkat desa, dukuh, dan juga tingkat RT dan RW. Memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk mensukseskan pilihan presiden baik di tahun 2004, 2009, dan juga tahun 2014 ini. Tapi sifatnya mensukseskan. Dalam artian untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan juga menjaga lingkungan agar diberikunya tidak terjadi permasalahan baik konflik dan lain-lain seusai pemilihan presiden. Kemungkinan kemaren karena pengguna suara banyak karena boleh menggunakan KTP dan KK jadi itu yang menyebabkan partisipasi masyarakat itu tinggi. Walaupun tidak tercatat dalam DPT.

2. Bagaimana cara untuk menggerakkan atau mengkoordinir masyarakat agar sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik?

Jawaban: karena memang peta demokrasi itu sudah ditetapkan karena kedepan presiden itu menentukan kebijakan selayaknya pemilihan kepala desa maka kita himbau masyarakat agar menentukan pilihanya masing-masing. Karena tingkat

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk Pemilihan Umum Kepala Presiden merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tinggi rendahnya partisipasi politik dapat mendeskripsikan tingkat demokratisasi dan merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Apalagi kemaren hanya dua calonnya maka idealisme masyarakat sudah terarahkan dan pemetaanya sudah jelas kelihatan, sehingga melihat hal yang seperti itu maka pemerintah desa menghawatirkan akan terjadi rawan konflik maka kita sebagai perangkat desa selalu menyerukan agar mengadakan jam malam dan berjaga-jaga bagi aparat keamanan desa dengan mengadakan keliling tiap malam.

3. Bagaimana caranya pak untuk mengkoordinir masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden?

Jawaban: kalo menjelang akhir pendaftaran kita menghimbau dan menumpulkan KPPS untuk menyampaikan kepada masyarakat dan juga kepada dukuh agar mengumumkan di masjid-masjid atau di tempat yang ada pengeras suaranya agar siapa yang belum mendaftarkan di ke KPPS agar segera mendaftarkan dirinya untuk bisa memilih pada pemilihan presiden mendatang, kalo pemilih dari luar daerah disini juga ada. Yang penting menunjukkan KTP dan KK.

4. Tindakan apa saja yang menjadi contoh teladan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawaban: kita dengan cara memberikan pengumuman lewat pak dukuh,

dan pada hari pencoblosan KPPS di intruksikan untuk memanggil bagi para pemilih agar segera datang ke TPS untuk mencoblos karena jamnya hanya dari jam 07.00 wib sampai jam 12.00 siang saja. Karena pemerintah desa ini bukan KPPS tapi yang mengumumkan diwarga adalah pak dukuh dan juga perangkat desa lainnya. Bukanhanya itu karena, Kepala desa juga berperan dalam pembangunan desa, Bukan hanya pembangunan fisik saja tetapi juga berperan dalam pembangunan mental masyarakat desa. Kepala Desa menjadi tempat bertanya dan bernaung dalam segala kepentingan masyarakat desa dan juga mengkoordinasikan lembaga lembaga desa

5. Apakah semua Dukuh yang ada di Tirtomartani ikut mensukseskan pemilihan presiden ini pak?

Jawaban : iya pak lurah memerintah pak dukuh, dan pak dukuh mengingatkan pada warga.

6. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden?

Jawaban: kalo di pemilihan presiden memang tidak terlalu layaknya pemilihan kepala desa karena mungkin dianggap jauh orangnya dan tidak bertemu orangnya, walau kemaren sempat terjadi ketegangan karena ada masyarakat yang deklarasi memilih salahsatu calon tidak minta izin lokasi kepada yang punya tempat dan hamper ada kegesekan karena salah satu Parpol pendukung calon

satunya sudah berkonvoi dan berkampanye, dan intinya selalu kita himbau pada masyarakat walaupun beda pilihan pastinya harus selalu damai karena itu tugas dari perangkat desa ataupun pak dukuh masing karena sudah kewajiban. Walau ada pak dukuh yang mendukung salah satu calon harus tidak boleh memperlihatkan dukungannya tersebut agar masyarakat tetap damai dan nyaman tidak ada konflik setelah pemilihan.

7. ada berapa dukuh pak di tirtomartani?

Jawaban: ada 17 (Tujuh Belas) padukuhan kalo TPSnya ada tujuh kelihatnya,

8. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden?

Jawaban: hambatannya bagi masyarakat tirtomartani mempunyai anggapan bahwa pemilihan presiden tidak mempunyai dampak secara langsung kerakyat, karena pandangan masyarakat bahwa calon presiden ini hanya janji-janji saja kepada masyarakat, kecuali masyarakat yang sudah dekat dan seidiologis dengan partai tertentu, kalo disini beda kaos itu biasa saja sudah menjadi hal yang lumrah.

9. Apakah ada yang kasih uang untuk nyoblos salah satu calon pak?

Jawaban: kalo disini tidak ada kalo legislative saya kurang tau, hehehe , memang tidak ada dari tim sukses presiden yang memberikan uang kepada masyarakat untuk memiliha calonnya. Dan kaos itu saja katanya beli, kampanye di lapangan juga tidak ada adanya Cuma deklarasi aja.



10. Apakah ada kesenjangan masyarakat yang terjadi di Tirtomartani karena melihat masyarakatnya yang beragam, ada dari kalangan terpelajar, petani, peternak dll?

Jawaban: jadi memang tidak ada kesenjangan dari masyarakat karena dosen, mahasiswa, guru, petani, dan masyarakat lain mempunyai suara yang sama, tapi belum tentu satu orang dosen bisa mengajak 5 orang buruh untuk memilih tapi satu orang preman bisa mengajak belasan orang untuk memilih, karena di Tirtomartani ini daya sosial masyarakatnya yang mendukung bukan dari pendidikannya. Dan bahkan waktu rekapitulasi suara banyak masyarakat yang datang, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita saling memberikan dukungan, dan di sini yang menang Jokowi dan dikalasan adalah Jokowi yang menang, tapi selisihnya tidak banyak.

11. Sosialisasi kemasyarakatan berapa kali Pak?

Jawaban: kita melakukan sosialisasi yang sifatnya formal 1 kali dengan mengumpulkan masyarakat ke kantor kepala desa.

## DAFTAR PERTANYAAN

**Nama : Imam Baihadi**

**Jabatan : Pj Sekretaris Desa Tamanmaartani**

**Tanggal :25- Januari- 2015**

1. Apakah sebelum diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada desa sudah mengadakan sosialisasi?

Jawaban : Mengadakan sosialisasi dengan dukuh dan juga perangkat desa lainnya, dengan cara menumpulkan mereka dengan jumlah kurang lebih 1000 orang dibalai desa kadang juga di rumah kepala dukuh.

2. Bagaimana cara untuk menggerakkan atau mengkoordinir masyarakat agar sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik?

Jawaban : selalu mengingatkan jika ada pertemuan di tingkat Pedukuhan, RT, dan RW.

3. Tindakan apa saja yang menjadi contoh teladan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawaban : memberikan contoh untuk mencoblos agar masyarakat ikut mencoblos juga.

4. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden?

Jawaban : selalu mengingatkan dan mensosialisasikan di jajaran perangkat desa agar menyebarkan pada masyarakat baik itu tingkata RT, RW, dan Dukuh. Selalu mengingatkan pada warga, hal ini juga peran kepala desa sangat akurat Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Kepala Desa harus mampu terampil dalam mengurus orang lain, memiliki kepekaan inisiatif dan mempunyai persepsi positif serta jalan keluar dari setiap masalah

5. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden?

Jawaban: terletak pada pendidikan masyarakat dan perekonomian semakin tinggi pendidikan dan perekonomian semakin tak ada beban dalam mencoblos.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

**Nama** : Gandang Harjunata  
**Jabatan** : Kepala Desa Tamanmartani  
**Tanggal** :25- Januari- 2015

1. Apakah sebelum diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada desa sudah mengadakan sosialisasi?

Jawaban : iya mengadakan sosialisasi dengan bekerjasama dengan KPPS setempat, dukuh dan juga perangkat desa lainnya, dengan cara menumpulkan masyarakat dirumah-rumah pak dukuh dan juga dikumpulkan di balai desa. Dan juga memberikan bimbingan kepada bawahan dalam bentuk intruksi-intruksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selaku kepala desa atau pimpinan desa kami juga menjadi panutan bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dan tentunya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Bagaimana cara untuk menggerakkan atau mengkoordinir masyarakat agar sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik?

Jawaban : Selalu memberikan pengarahan bahwa akan ada pemilihan presiden dan selalu mengingatkan jika ada pertemuan di tingkat RT dan RW.

3. Tindakan apa saja yang menjadi contoh teladan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawaban : Kepala desa ikut juga mencoblos dan memilih presiden.

4. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden?

Jawaban : dalam sosialisasi selalu disinggung tentang pentingnya menggunakan hak pilih tanpa membawa kepentingan salah satu calon dan masyarakat harus netral tidak boleh provokasi masyarakat lain denganberpihak pada salah satu pasangan presiden yang bukan pilihannya.

5. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden?

Jawaban: tingkat pendidikan masyarakat menjadi pengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara, semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin siap untuk memilih dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang ekonominya baik juga tingkat partisipasi masyarakatnya cenderung baik dalam menggunakan hak pilihnya. Jika sebaliknya masyarakat dengan ekonomi kurang cenderung tidak memilih karena lebih mementingkan pekerjaannya untuk hidupnya.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

**Nama** : Pak Haji  
**Jabatan** : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Purwomartani  
**Tanggal** :21- Januari- 2015

1. Apakah sebelum diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada desa sudah mengadakan sosialisasi?

Jawaban: Sudah setiap pertemuan dengan perangkat desa selalu diberikan pengarahan agar menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan akan adanya pemilihan presiden.

2. Bagaimana cara untuk menggerakkan atau mengkoordinir masyarakat agar sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik?

Jawaban: bahwa partisipasi politik itu merupakan hak demokrasi masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kepentingan untuk menyalurkan suaranya, dengan sosialisasi dalam moment tertentu, arisan RT, RW, pemahaman politik kepada masyarakat, setiap perdukahan 21 maka banyak sekali belum lagi dari karangtaruna, pemuda-pemuda dan juga dukuh-dukuh turun kemasyarakat

3. Tindakan apa saja yang menjadi contoh teladan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawaban: kita datang ke TPS lebih awal dan melakukan tindakan sesuai

mekanisme pemerintahan. Tidak melakukan intervensi dan tidak menampilkan untuk mendukung salah satu calon presiden tertentu, dan tidak menunjukkan symbol-simbol dari salah satu calon.

4. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden?

Jawaban: diberikan penjelasan kepada masyarakat apakah maksud dari pemilihan presiden, bahwa satu suara itu akan memberikan kebijakan dan imbasnya terhadap rakyat untuk lima tahun kedepan,

5. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden?

Jawaban: dari faktor ekonomi, apapun program dari pemerintah sementara masyarakatnya lapar maka akan sulit untuk mengakomodir partisipasi masyarakat untuk ikut aktif didalamnya begitu juga dengan pemilihan presiden ini, sedangkan dalam pemilihan presiden kali ini tidak ada ganti upah kerja mereka, bilang saja dalam satu hari jika mereka ikut partisipasi maka akan kehilangan uang kerja mereka katakan saja Rp. 50.000,- hal ini menjadi sangat berat bagi masyarakat yang dalam taraf ekonomi bawah dalam artian kekurangan dalam hidupnya. Dan disini saya menggolongkan 40% adalah pemilih rasional yang mau memilih, dan di puwomartani tingkat pemilihnya meningkat low dek dari 75 persen tahun 2009 meningkat jadi 80 persen di 2014 ini, ini menunjukkan partisipasi masyarakat meningkat 5 persen dari tahun sebelumnya.

6. Apa strateginya bisa membuat masyarakat aktif dalam pemilihan presiden

tahun 2014 ini?

Jawaban: mulai dari dukuh RT RW dan semua perangkat desa kita ajak mensosialisasikan turun para masyarakat agar ikut mencoblos dan menentukan pemimpin mereka lima tahun mendatang, karena kalo masyarakat asli Purwomartani kalo tidak nyoblos malu, itu yang sering menjadi slogan masyarakat sini, dan sering saya dengar perkataan “pemilu-pemilu kok ke-sawah”. Itu bisa dilihat disini kalo pada hari pencoblosan tidak ada aktifitas disawah. Kalo menurut saya orang yang pendidikanya sendiri kalo tidak solid pada partai tertentu maka dia menjadi apathies. Disamping itu cara untuk mewujudkan partisipasi masyarakat meningkat dengan merekrut panitia KPPS itu adalah orang-orang yang berpengaruh di wilayahnya tapi bukan pejabat pemerintahan desa.



## **DAFTAR PERTANYAAN**

**Nama** : M. Juhar Arifin, Sp.  
**Jabatan** : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Tamanmaartani  
**Tanggal** :25- Januari- 2015

1. Apakah sebelum diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada desa sudah mengadakan sosialisasi?

Jawaban : kami segenap perangkat desa tamanmartani mengadakan sosialisasi dengan bekerjasama dengan KPPS setempat, dukuh dan juga perangkat desa lainnya, dengan cara menumpulkan masyarakat dirumah-rumah kepala dukuh di tamanmartani terhitung 22 pedukuhan yang ada dan juga dikumpulkan di balai desa.

2. Bagaimana cara untuk menggerakkan atau mengkoordinir masyarakat agar sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik?

Jawaban : Baik kami maupun pak lurah selalu memberikan pengarahan bahwa akan ada pemilihan presiden dan selalu mengingatkan jika ada pertemuan di tingkat pedukuhan, RT, dan RW.

3. Tindakan apa saja yang menjadi contoh teladan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawaban : kami segenap perangkat desa ikut juga mencoblos dan memilih presiden dan juga tidak menampakkan keberpihakan kita dalam memilih salah

satu calon.

4. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden?

Jawaban : sosialisasi yang kita adakan selalu disinggung tentang pentingnya menggunakan hak pilih tanpa membawa kepentingan salah satu calon dan masyarakat harus netral.

5. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden?

Jawaban: terletak pada pendidikan masyarakat semakin tinggi pendidikannya semakin giat dalam mencoblos semakin rendah antusiasnya rendah.

## **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Mohammad Nur Aris Shoim  
TTL : Bojonegoro, 19 April 1988  
Alamat Asal : Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro  
Alamat Jogjakarta : Jl.Ori II Gang Ori II No.9B Dusun Papringan, Sleman,  
Yogyakarta  
Jur/Fak/Univ : Ilmu Hukum/ Syari'ah dan Hukum/ UIN Sunan Kalijaga  
No.HP : 089671562007/081316310021

### **Pengalaman Organisasi**

- Pengurus Departemen Pendidikan dan Kedisiplinan OSIS MA Abu Darin Kendal Dander Bojonegoro Periode 2004-2005
- Sekretaris Lembaga Bahsul Masa'il Santri Kendal Dander Bojonegoro Periode 2006-2007
- Wakil Bendahara Pengurus Harian Pondok Pesantren Abu Dzarrin Kendal Dander Bojonegoro 2006-2008
- Sekretaris Pengurus Harian Pondok Pesantren Abu Dzarrin Kendal Dander Bojonegoro Periode 2009-2011
- Anggota Jaringan Komunikasi dan Informasi LPM ARENA UIN Suka 2012-2013
- Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Yogyakarta 2012-2013
- Sekretaris Umum HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka 2012-2013

- MPKPK HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka 2013-2015
- Wasekum Bidang PTKP HMI Cabang Yogyakarta 2013-2014
- Anggota Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Yogyakarta 2013-sekarang
- Presiden Partai Pencerahan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2013-2014
- Pengurus IKPMDI Yogyakarta 2013-2015
- Dirut Bidang Publikasi Di LSM Lentera Caraka Nusantara (LCN) 2014-2019
- Pimpinan Redaksi CarakaNews.Com 2014
- Pengurus Besar HMI Departemen Bidang Hukum dan Ham Periode 2016-2018

Yogyakarta, 19 Januari 2016

**(Mohammad Nur Aris Sho' im)**

